

Pergeseran Fungsi Pura di Bali: Dari Ritual ke Pertemuan Politik

A.A Sagung Ngurah Indradewi
Universitas Dwijendra
Email: sagungindradewi@gmail.com

Abstract

This article tries to assert the focus of discussion on the function of temples in Bali that shifts to sociological and political functions. The external pressure sociological and political dimensions are assumed to be able to shift or to complete the function of the temple as a place of worship for Hindus in Bali. The sociological function of temple is as a means of reunion for Hindus who live far from their family and the political function is the temple can be used as a place to hold political meetings by political leaders who will participate in local elections. Can the temple functions be shifted? Six informants who are considered being the most competent to answer this question stated "not" because it is due to a political meeting included giving donation for the temple maintenance and helping to finance such a big scale ceremony of Hindus in Bali.

Keywords: Function, temples, and political meetings.

Abstrak

Tulisan ini berusaha menegaskan fokus pembahasan pada kecenderungan fungsi pura di Bali bergeser ke arah fungsi sosiologis dan politis. Tekanan eksternal yang berdampak luas dari segi sosiologis dan politis diasumsikan akan dapat menggeser atau melengkapi fungsi pura sebagai tempat ibadah umat Hindu di Bali. Fungsi sosiologis antara lain pura dapat menjadi sarana berkumpul umat Hindu yang berdomisili saling berjauhan dan fungsi politis digunakannya pura sebagai tempat pertemuan politik oleh para tokoh politik yang akan mengikuti pemilihan umum daerah. Apakah fungsi pura dapat bergeser? Enam informan yang dianggap paling berkompeten menjawab persoalan ini, menyatakan tidak karena pertemuan politik menyertakan sumbangan *dana punia* untuk pemeliharaan pura dan membantu pembiayaan upacara *pidalan* yang demikian besar ditanggung umat Hindu Bali.

Kata Kunci: Fungsi, pura dan pertemuan politik

1. Pendahuluan

Dalam *“Het godsdienstig karakter der Balische dorpsgemeenschap”* (Karakter keagamaan masyarakat desa Bali) (*Djava* XV (1953: 1–16), R. Goris menulis dan menyatakan dengan tegas bahwa, masyarakat pedesaan di Bali bersifat sangat religius. Kondisi ini dengan mudah dapat diketahui melalui dua fenomena, yakni (1) banyaknya pura (yang bertebaran) di Pulau Bali sehingga Bali disebut “Pulau Seribu Pura”, dan (2) maraknya upacara agama yang menyangkut siklus hidup (*manusia yadnya*) dan upacara *piodalan* (*dewa yadnya*). Tentu saja upacara *piodalan* di pura, terutama pura *kahyangan tiga* melibatkan banyak umat Hindu, bahkan berbagai aktivitas pendukung pun berlangsung di sana dalam beberapa hari, bahkan lebih dari satu bulan. Dalam bahasa Lekkerkerker sebagaimana dikutip Goris, hal demikian merupakan kekuatan yang tidak terpatahkan mengenai konsep personal dan sosial, yang mendominasi kehidupan orang (Hindu) Bali, yang menyerap dan menyatukan masyarakat dan menentukan ritus-ritus dari masing-masing orang, keluarga, perkumpulan pengairan desa dan negeri (Goris, 2012: 1).

Bahkan, tidak hanya Goris, beberapa penulis lain juga menekankan sifat religius komunitas pedesaan di Bali, yang membentuk suatu kesatuan yang tertutup dan mencukupi diri sendiri – sebuah *republik* sebagaimana Korn telah secara tepat menyebutnya—bisa diasumsikan sebagai telah diketahui umum. I Wayan Ardika ketika menulis kata pengantar untuk buku terjemahan Goris *Sifat Religius Masyarakat Pedesaan di Bali* mengemukakan, bahwa para peneliti asing menyatakan bahwa desa-desa di Bali sangat otonom, seperti sebuah *republik*. Masing-masing desa adat/*desa pakraman* di Bali memiliki wilayah, pura dan kuburan tersendiri (Ardika dalam pengantar untuk Goris, 2012: IX).

Dalam kaitannya dengan hidup keagamaan, lanjut Ardika, masyarakat Hindu di Bali memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan upacara dan pemeliharaan pura, serta melakukan penghormatan dan pemujaan terhadap roh leluhur. Pieter (Piet) Lieftrinck menemukan konsep ideologi yang melandasi karakter kehidupan keagamaan yang mempercayai bahwa tanah adalah milik Tuhan/Ida Sanghyang Widi Wasa. ini tersurat pada *awig-awig* desa adat di Bali. Penduduk desa berkewajiban menjaga hubungan baik dan menghaturkan sesajen untuk para dewa dan bila hal itu

tidak dilakukan maka bencana dan malapetaka akan menimpanya.

Dalam pidato yang disampaikan di Denpasar 19 Oktober 1937 berjudul “Bali’s Tempelwezen” (“Sistem Pura di Bali”), Goris merinci klasifikasi pura-pura di Bali, selain *pura kahyangan tiga* di tingkat desa, antara lain pura keluarga (*sanggah/merajan*), tempat sembahyang yang lebih kecil untuk Dewi Melanting di pasar-pasar, pura untuk *clan* tertentu (*pura pemaksaan, pura panti*), pura pengairan (*pura subak*). Berbagai macam pura yang disebutkan Goris tersebut berkaitan dengan adanya banyak dewa yang disembah dalam kepercayaan (masyarakat) Hindu Bali. Hinduisme memang mempunyai banyak dewa (Brahma dengan Saraswati, Siwa dengan Durga, Wisnu dengan Dewi Sri dan Ganesa untuk menyebut hanya yang paling populer di antara para dewa Hindu), di samping banyak setan dan para *bhuta kala* yang artinya *Bhuta* adalah *telah dijadikan* ataupun *diwujudkan*. Sedangkan untuk kata “kala”, berarti energi, waktu, sehingga kata *bhuta kala* artinya adalah energi yang timbul dan mengakibatkan kegelapan. Tidak berlebihan jika Goris menyatakan sifat religius masyarakat Bali tercermin dari adanya pura-pura tersebut.

Dengan demikian sangat jelas, bahwa pura adalah sarana atau tempat suci untuk memuja Ida Sanghyang Widi Wasa, para dewa dan roh leluhur melalui serangkaian upacara yang tidak pernah putus. Dilihat dari fungsinya yang demikian itu, pola dan sistem pengelolaan serta desain dan rencana pembangunan pura pun mengikuti ketentuan yang diisyaratkan oleh *Lontar Kosa Kosali*, antara lain pembangunan pura mengikuti proses *ngeruak, nyukat pelinggih, nangum pelinggih, memakuh, melaspas* dengan sebelumnya memilih lokasi pura harus berorientasi ke utara atau ke tempat yang dianggap suci dan sakral.

Mengikuti proses pembangunan pura yang demikian itu, tidak berlebihan kalau dalam pandangan orang Hindu Bali bahwa pura dianggap sebagai tempat suci sebagai tempat pemujaan Tuhan, para dewa dan roh leluhur, meskipun pada awalnya makna kata *pura* bukanlah untuk menunjuk tempat suci seperti itu. Kata *pura* berasal dari kata (bahasa) Sanskerta, yaitu *pur* yang artinya istana atau keraton (Mardiwarsito, 1978:256), yakni suatu tempat yang dikelilingi tembok pembatas. Karena itu, pasar yang telah diberi tembok pembatas juga disebut pura. Dalam perkembangan pemakaiannya di Pulau Bali, istilah “Pura” menjadi khusus untuk

tempat ibadah; sedangkan istilah “Puri” menjadi khusus untuk tempat tinggal para raja dan bangsawan menteri serta patih. Bahkan, keraton Yogyakarta sampai sekarang disebut *Pura Ngayogyakarta Adiningrat* di Jawa. Di Bali, diperkirakan pada abad ke-10, setelah perkawinan Raja Udayana dengan putri raja Jawa, yang bernama Mahendra Datta, kata *pura* sudah digunakan terbukti pusat kerajaan Samprangan disebut Linggarsa Pura. Setelah pindah ke Gelgel di sebelah selatan Kota Klungkung lalu diberi nama *Smara Pura*. Kira-kira pada abad ke-16, saat pemerintahan Dalem Watuenggong barulah kata *pura* diubah menjadi *puri* untuk menyebutkan tempat tinggal Raja, maka *Smara Pura* berubah menjadi Puri Klungkung. Sampai di sini, belum jelas kapan sebenarnya kata *pura* digunakan untuk menyebut tempat suci agama Hindu di Bali. Akan tetapi, ketika Rudini menjadi Menteri Dalam Negeri (1988-1993) Kota Klungkung diubah namanya kembali menjadi *Smara Pura*.



Foto 1. Pura yang merupakan tempat suci berkembang menjadi daya tarik wisata dan juga sering dikunjungi tokoh untuk kepentingan politik (Foto Darma Putra).

Pemerintah Orde Baru melalui Menteri Dalam Negeri Rudini tidak saja mengubah nama Kota Klungkung menjadi *Smara Pura*, tetapi juga dimulainya pura disusupi aktivitas politik, terutama menjelang pemilihan umum, antara lain oleh Partai Golkar sehingga

fenomena itu dikenal dengan sebutan kuningnisasi pura. Artinya, berbagai pertemuan politik tidak saja diselenggarakan ketika *piodalan* terutama di pura Desa/Puseh, tetapi juga pura-pura lain yang diperkirakan memiliki cukup banyak *pemedek* (masyarakat). Ironisnya, aktivitas politik semacam itu, bahkan sampai sekarang masih berlangsung tanpa menimbulkan protes baik dari *penyusung* pura maupun dari desa adat (wawancara dengan I Ketut Wiana, 5/6/2016). Tiadanya protes ketika Orde Baru melalui Partai Golkar melaksanakan proyek kuningnisasi ke pura-pura di Bali, mungkin karena masyarakat adat di Bali tidak ingin berurusan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa pada waktu itu. Namun, ketika hal yang sama masih dilakukan baik oleh perorangan, maupun partai politik, meskipun mungkin dengan cara-cara yang lebih halus, pada masa Reformasi pun tidak menimbulkan protes. Cara-cara yang ditempuh tokoh-tokoh politik itu, antara lain ikut menghadiri upacara *piodalan* di pura tertentu, dengan mengenakan pakaian adat Bali sambil memberikan sumbangan, yang diperhalus dengan sebutan *dana punia*. Tentu saja aktivitas politik ini tidak menimbulkan protes, karena telah terjadi semacam kesepakatan diam-diam, atau transaksi politik yang samar-samar dengan kebutuhan untuk mendapatkan biaya tambahan untuk menutupi kekurangan beban pemeliharaan pura dan upacara *piodalan* yang demikian besar, yang biasanya ditanggung renteng oleh *krama* desa adat atau oleh *penyungsung* pura masing-masing.

Pembiaran fenomena kuningnisasi pada masa Orde Baru dan proyek politik yang mirip seperti itu, pada masa sesudahnya, mencerminkan adanya sisi dilematis bagi desa adat itu sendiri. Di satu sisi, ada sebagian masyarakat desa adat yang menilai proyek politisasi semacam itu tidak sepatutnya dilaksanakan di dalam pura yang *notabene* tempat suci untuk memuja Tuhan, para dewa dan roh leluhur, dan di sisi lain proyek politisasi pura itu menyumbang pemasukan pada pengelola pura untuk pemeliharaan atau renovasi pura agar struktur pura lebih kuat dan indah, serta untuk menutupi kekurangan biaya upacara *piodalan* yang relatif besar. Karena itu, pengelola pura di Bali tidak dapat menentukan sikap tegas, mengembalikan fungsi pura sebagai tempat suci dan tempat pemujaan saja dengan menolak kedatangan politisi yang datang berkedok memohon doa restu secara niskala namun memiliki tujuan lain dengan kemungkinan, misalnya melakukan aktivitas politik

untuk kepentingan perorangan atau partai politik atau memohon dukungan secara sekala. Peranan desa atau pengelola pura disini sangat penting dalam mengatur tujuan atau kemauan orang masuk pura yang dapat dituangkan melalui *awig-awig* desa sehingga pura tidak dijadikan tempat berkumpulnya para politisi pada saat pesta demokrasi mencari dukungan politik. Politik memang tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Bali termasuk dalam urusan adat dan agama (Putra 2008). Sejarah Pura Besakih sampai perkembangannya sekarang ini pun penuh dengan dimensi politik, digunakan penguasa untuk menunjukkan kekuasaannya melalui rangkaian upacara-upacara (Fox 2002). Bagaimana pura menjadi perseteruan kuasa dan kewargaan juga pernah dibahas oleh I Gde Pitana (2001), yang menunjukkan bahwa pura menjadi arena lebih dari sekadar untuk persembahyangan, tetapi juga untuk urusan sosial politik lainnya.

Selanjutnya menarik untuk diketahui dengan mencari jawaban atas hal tersebut di atas, apakah fungsi pura telah bergeser ke fungsi politik, atau fungsi ganda (ritual dan politik) bukanlah suatu masalah, karena justru kegiatan politik di pura itu dapat mendukung kontinuitas pelaksanaan upacara *pidalan* dan pemeliharaan pura-pura di Bali. Sesuai fungsinya, pura merupakan tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam *prabawa*-Nya (manifestasi-Nya) dan atau Atma Sidha Dewata (roh suci leluhur) dengan sarana upacara yadnya dari Tri Marga sesuai fungsinya Pura merupakan tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam *prabawa*-Nya (manifestasi-Nya) dan atau Atma Sidha Dewata (roh suci leluhur) dengan sarana upacara yadnya dari Tri Marga dan dalam acara politik dan fungsi puri menjadi bertujuan untuk memberikan peluang kepada tokoh-tokoh politik itu, antara lain ikut menghadiri upacara *pidalan* di pura tertentu, dengan mengenakan pakaian adat Bali sambil memberikan sumbangan, yang diperhalus dengan sebutan *dana punia*. Untuk dapat membahas hal ini, diperlukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat Hindu Bali yang dianggap memahami masalah pergeseran fungsi pura dan memiliki persepsi serta solusi atas masalah ini. Untuk keperluan ini, tidak kurang dari enam tokoh agama Hindu dipilih dan ditetapkan sebagai informan yang kemudian diwawancara secara agak bebas, tetapi tetap berfokus pada informasi, data dan keterangan seputar kecenderungan terjadinya pergeseran fungsi pura di Bali.

2. Pembahasan

Seperti disebutkan di atas, sejak masa Orde Baru *pura* telah dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan politik secara terselubung, terutama menjelang dilaksanakan pemilihan umum, pemilihan umum daerah dan lain-lain. Tokoh-tokoh politik yang hadir bertepatan dengan hari *piodalan* di pura tertentu, terutama pura yang banyak memiliki *pemedek*/masyarakat yang datang ke pura tidak lagi dari Partai Golkar, tetapi juga dari partai-partai lain, bahkan perorangan yang ingin mendapatkan dukungan politik dari *pengempon* pura. Mereka mungkin mewakili partai, diri sendiri baik yang sedang berkuasa (petahana), tetapi akan melanjutkan kekuasaannya dalam periode berikutnya, maupun calon penguasa baru yang akan mengikuti persaingan dalam suatu pemilihan daerah.

Kehadiran para tokoh politik ke pura-pura selalu diiringi oleh wartawan media massa seperti televisi lokal, tentu saja dengan alasan tertentu dan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, antara dirinya (dan/atau tim suksesnya) dengan tokoh *pengempon* pura itu, atau dengan *bendesa adat* kalau pura yang akan didatanginya adalah *pura kahyangan tiga*. Walaupun dinyatakan dengan sangat hati-hati dan cenderung samar-samar, tujuan masing-masing tokoh yang saling berhadapan itu, tampak dengan jelas dan gampang diketahui umum. Di satu pihak kehadiran tokoh politik ke pura saat (di pura itu) diselenggarakan *piodalan agung* atau *alit*, telah diketahui dengan jelas oleh pihak yang menyambutnya, yakni yang mengharap (dalam bahasa yang lebih halus memohon) dukungan moral agar tokoh yang bersangkutan memperoleh kesempatan untuk mengabdikan diri dan kemampuannya untuk membangun masyarakat agar lebih sejahtera lagi. Dengan bahasa yang agak kasar dapat dikatakan bahwa kehadiran tokoh-tokoh politik di pura tertentu jelas memiliki tujuan politik, antara lain bagi petahana agar dapat melanjutkan kekuasaannya, dan bagi calon penguasa agar memperoleh kesempatan untuk berkuasa, dan untuk mencapai tujuan tersebut tidak lain dari memperoleh dukungan suara yang akan menentukan keberhasilannya dalam suatu pemilihan. Harus diakui, jujur atau tidak jujur sesungguhnya kontrak lisan tokoh politik itu hanya sampai pada batas perolehan suara itu, sedangkan kepentingan pihak *pengempon pura* hanya sampai pada batas penerimaan *dana punia* yang akan digunakan

untuk pemeliharaan pura dan biaya upacara *piodalan* di pura bersangkutan. Setelah itu, ada kemungkinan janji-janji sang politisi hanya tinggal janji, sedangkan janji *penyungsung* pura akan memberikan dukungan suara dalam suatu pemilihan politik juga persoalan lain.

Meskipun demikian, persoalan politisasi pura belum selesai dan dua kepentingan itu menjadi dilematis. Di pihak tokoh politik sering kali mengalami kekecewaan karena telah mengeluarkan dana yang begitu besar, tetapi tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan di pihak *pengempon* dan *pemedek pura* timbul pandangan yang berbeda, yakni di satu sisi timbul pandangan yang tidak mempersoalkan pura dijadikan tempat pertemuan (kampanye) politik terselubung asal diperoleh dana untuk pemeliharaan pura dan menutupi kekurangan biaya upacara *piodalan* yang demikian besar. Di sisi lain, muncul pandangan yang cenderung purifikatif, yang menyebutkan bahwa fungsi pura harus dikembalikan ke fungsi semula, yakni hanya tempat untuk melaksanakan ritual agama Hindu Bali. Syukurnya, pandangan yang saling berlawanan ini tidak pernah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak berakhir dengan kekerasan karena sesungguhnya kontrak lisan tokoh politik itu hanya sampai pada batas perolehan suara itu, sedangkan kepentingan pihak *pengempon pura* hanya sampai pada batas penerimaan *dana punia* yang akan digunakan untuk pemeliharaan pura dan biaya upacara *piodalan* di pura bersangkutan. Setelah itu, ada kemungkinan janji-janji sang politisi hanya tinggal janji, sedangkan janji *penyungsung* pura akan memberikan dukungan suara dalam suatu pemilihan politik juga persoalan lain.

Ironisnya, enam narasumber yang terdiri atas kalangan intelektual akademisi dan dua di antaranya penduduk biasa *pengempon* pura tidak melihat kemungkinan pura dimanfaatkan untuk pertemuan politik saat-saat menjelang pemilihan umum daerah Bali sebagaimana sesungguhnya telah terjadi sejak masa-masa Orde Baru. Hampir semua narasumber itu melihat kemungkinan pergeseran fungsi pura ke arah yang lebih baik, antara lain semakin gencarnya umat Hindu Bali melaksanakan renovasi dan perbaikan pura, pembangunan pura baru bahkan sampai ke beberapa tempat di Jawa, meningkatnya kesadaran *sradha bhakti* umat Hindu hanya dengan menggunakan tolok ukur

semakin banyaknya *pemedek* datang bersembahyang ke pura-pura, penambahan berbagai kegiatan selain upacara *piodalan* sembahyang dan *maturan*, yakni *darma wacana*, *darma tula*, kesenian dan lain-lain.

Pemanfaatan pura sebagai objek wisata justru dianggap sebagai hal yang negatif, apabila tidak diatur dengan baik dan sesuai dengan manajemen modern (wawancara dengan Nengah Duija, Guru Besar Rektor IHDN Denpasar 25/2/2016). Lebih lanjut Nengah Duija menyatakan bahwa pemanfaatan pura sebagai objek wisata belum ditata dengan menggunakan manajemen modern sehingga ada yang menonjolkan pembayaran tiket masuk saja, dan ada yang mengutamakan penyewaan *slempot* (selendang) saja, tanpa disertai dengan penjelasan mengenai pura itu sendiri. Hampir semua informan tidak menyinggung kemungkinan pura di Bali sebagai objek kunjungan wisata yang justru menunjang devisa negara dan meningkatkan perekonomian daerah Bali.

Sebaliknya, Wayan Suarjaya (dosen IHDN dan mantan Dirjen Bimas Hindu dan Budha, Kementerian Agama RI) menilai perkembangan pariwisata Bali yang demikian pesat dan pembangunan yang demikian gencar memberi pengaruh positif terhadap tampilan fisik pura-pura di Bali. Menurut Suarjaya fungsi pura memang telah bergeser, tetapi ke arah yang positif. Artinya, ke arah yang benar dan baik menurut ukuran dan ajaran agama Hindu. Tanpa memberi penjelasan seperti apa ukuran dan ajaran agama Hindu itu, Suarjaya menyatakan bahwa sejak PJP I, atau Program Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun, yang dibagi menjadi Repelita I s.d. V, pembangunan di bidang agama juga mendapat perhatian yang cukup serius dan baik terutama dari umat beragama itu sendiri, lembaga tertentu dan Pemerintah. Hal ini, menurut Suarjaya, terbukti dari semakin membaiknya tampilan fisik pura baik pura-pura di Bali maupun di Jawa. Dikatakan, dulu bentuk dan tampilan pura masih sederhana, tetapi sekarang tampilan fisik pura-pura di Bali sangat indah, berisi hiasan atau ukiran-ukiran yang indah (wawancara dengan Wayan Suarjaya), 26/1/2016).

Sebagian pernyataan Wayan Suarjaya mengandung kebenaran ketika ia mengatakan pertumbuhan pendirian pura sebagai tempat ibadah umat Hindu semakin meningkat sepanjang 27 tahun (antara tahun 1977–2004). Menurut data Departemen Agama RI tahun 2006, dalam konteks nasional bahwa selama 27 tahun itu, persentase

jumlah tempat ibadah umat Hindu mengalami peningkatan terbesar dibandingkan umat beragama lain di Indonesia.

Tabel 1: Perbandingan Jumlah Rumah Ibadah tahun 1977 dan 2005

Agama	1977	2005	% Kenaikan
Islam	192.044	643.834	64,22
Kristen	18,977	43.909	131,38
Katolik	4.934	24.431	152,80
Hindu	4.247	24.431	475,25
Buddha	1.523	7.129	38,09
Jumlah rata-rata	421,235	731.776	238,35

Sumber: <http://kemenag.go.id>

Jika tempat ibadah umat Islam sebagai warga mayoritas di Indonesia hanya naik 64,27 persen selama kurun waktu hampir 3 dekade, maka khusus rumah ibadah umat Hindu mengalami lonjakan 475,25 persen atau hampir meningkat 5 kali lipat pada kurun waktu yang sama. Realitas ini sedikit banyak bisa dijadikan sebagai salah satu parameter perkembangan kesadaran keagamaan yang luar biasa dari kalangan umat Hindu (lihat juga Mashad, 2014:3). Lantas bagaimanakah gambaran keagamaan umat Hindu di Bali? Adakah di samping meningkatnya kesadaran beragama di kalangan umat Hindu di Bali juga mendapat dukungan dana yang disebut *dana punia punia*, jika sebutan “Seribu Pura” itu dapat dijadikan parameter?

Ketika diminta untuk memberi komentar mengenai kemungkinan bergesernya fungsi pura di Bali, Wayan Wastawa, Dekan Fakultas Dharma Dutha IHDN Denpasar, melihat adanya pergeseran ke arah yang positif juga. Ia melihat kebangkitan umat Hindu Bali untuk datang bersembahyang ke pura merupakan perkembangan yang positif. Wayan Wastawa mengetakan demikian.

Kalau saya melihat adanya semangat umat yang demikian meningkat dalam kehidupan beragama, terutama dalam memperhatikan keberadaan pura sebagai sarana beragama, karena adanya perhatian yang meningkat banyak pura direstorasi umat baik pada *pelinggih*, tembok *penyengker*, bahkan banyak *pelinggih* dan *penyengker* yang memvisualisasikan nilai-nilai tatwa agama Hindu. Demikian

juga, penataan alam lingkungan mulai mendapatkan perhatian (Wawancara dengan Wayan Wastawa 28/2/2016).

Pandangan Wayan Wastawa di atas melihat perhatian umat Hindu Bali terhadap tampilan fisik dan lingkungan alam pura semakin baik jika dibandingkan masa-masa sebelumnya. Ihwal kemungkinan pura dimanfaatkan untuk pertemuan politik justru pada saat-saat umat Hindu sedang menyelenggarakan upacara *piodalan* di pura tidak ingin disinggung. Bahkan, Ketua Pengurus Harian Parisada Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Suidiana, juga tidak ingin menyinggung kemungkinan pura dimanfaatkan sebagai pertemuan politik. Meskipun demikian, Suidiana mengakui kemungkinan pergeseran fungsi pura dapat terjadi dan ini sudah merupakan proses alami. Dengan menggeser titik perhatian dikatakan bahwa perubahan sudah merupakan hukum Tuhan yang disebut *Rwa Bhineda* (Wawancara dengan I Gusti Ngurah Suidiana 23/1/2016). Suidiana malahan menawarkan resep untuk mencegah kemungkinan bergesernya fungsi pura dari kegiatan ritual ke kegiatan lain:

Untuk mencegah bergesernya fungsi pura ke arah negatif, maka *penyusung* pura perlu merumuskan fungsi pura dengan jelas dan tegas serta dengan perencanaan yang matang, yang didasarkan pada sastra agama Hindu, norma yang ada terkait dengan keberadaan pura itu. Pura adalah sarana yang sakral dan ini artinya pura akan senantiasa berkembang ke arah yang positif. Sekali lagi, penyusung pura harus merumuskan fungsi pura kemudian dituangkan ke dalam aturan yang jelas sehingga dinamikan pura bergerak ke arah yang positif (wawancara dengan I Gusti Ngurah Suidiana 23/1/2016).

Dengan tegas Ketua Harian PHDI Bali itu, menghendaki adanya aturan yang jelas dan tegas agar kecenderungan fungsi pura tidak bergeser ke arah yang negatif. Dua orang informan lainnya, Nyoman Rabeh (73 tahun), mantan Kelihan Banjar Bale Kembar Desa Pakraman Buala dan Ketut Simpartha (52 tahun), kelihan Warga Tuban Kresna Kepakisan Desa Pakraman Buala, tidak melihat kemungkinan fungsi pura bergeser ke arah lain, selain pura sebagai tempat untuk menyelenggarakan *piodalan*. Bahkan, kedua informan ini melihat segi positif pada fungsi sosiologis pura, antara lain mereka dapat bertemu kerabat dalam satu *clan* yang tinggal berjauhan dan bertemu ketika hari *piodalan*.

Fungsi pura yang kami rasakan dapat, yakni bertemunya antarwarga satu *clan*, yang berdomisili di Desa Pakraman Bualu maupun yang berdomisili di Desa Pakraman Kepaon setiap Budha Cemeng Menail. Lebih lanjut setiap Budha Cemeng Klawu kami warga Tuban Kresna Kepakisan bersembahyang bersama di Pura Kawitan yang keturunan Arya Kloping, sedangkan semua warga Kresna Kepakisan dari seluruh Bali dari tujuh Arya bertemu di Pura Dukuh di Gelgel Klungkung (wawancara dengan Ketut Simpartha 2/3/2016).

Harus diakui ada keengganan untuk berbicara mengenai kemungkinan fungsi pura bergeser ke arah yang negatif sebagai akibat dari dimanfaatkannya pura, terutama pura *Kahyangan Tiga* sebagai tempat pertemuan politik. Hal ini mungkin karena mereka (para informan itu) melihat segi positif dari kemungkinan pura digunakan sebagai tempat pertemuan politik dan segi positif itu adalah adanya sumbangan dari para tokoh politik dalam bentuk *dana punia*, dan sumbangan ini dapat dimanfaatkan untuk memelihara pura, bahkan merenovasi, serta untuk menutupi kekurangan biaya upacara yang demikian besar, yang memang memberatkan warganya. Tidak ditemukan jawaban apakah kesakralan pura dianggap berkurang setelah digunakan sebagai tempat pertemuan politik? Jika demikian, ada hal yang tersembunyi dalam benak umat Hindu Bali, yakni persoalan mencari upaya untuk mengurangi beban umat Hindu Bali untuk menanggung pemeliharaan pura dan biaya upacara *piodalan* yang dianggap masih tinggi.

3. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah diberikan kesimpulan bahwa umumnya umat Hindu di Bali menyadari dan melihat kecenderungan pura di Bali mengalami pergeseran fungsi, dalam arti fungsi awal bahwa pura adalah tempat suci untuk melaksanakan persembahan kepada Ida Sanghyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, para dewa dan roh leluhur sesuai dengan fungsi dan klasifikasi pura, tetapi perkembangan eksternal baik berdimensi sosiologi maupun politik turut menentukan fungsi tambahan yang dikenakan pada pura-pura di Bali. Tekanan eksternal berdimensi sosiologis. misalnya pura terutama pura *clan* dapat dijadikan tempat reuni anggota *clan* tertentu, yang berdomisili berjauhan. Pura *subak* dapat dijadikan tempat reuni para petani,

pura Melanting mempertemukan kaum pedagang dan seterusnya.

Tekanan eksternal berdimensi politik terhadap fungsi pura, terutama pura *kayangan tiga* yang memiliki *pemedek* cukup banyak, terjadi pada saat-saat menjelang diselenggarakannya pemilihan umum daerah. Tekanan itu, meskipun dalam bentuk dan cara terselubung mempunyai tujuan politis bagi tokoh politik yang menghadiri *piodalan* di pura tertentu, yakni untuk mendapatkan dukungan politik berupa pemberian suara pemilihan untuk tokoh yang bersangkutan, sedangkan para *pengempon* pura dan/atau *bendesa adat* menerima kehadiran mereka sebagai pihak yang melaksanakan *dana punia* yang dianggap sebagai kewajiban umat Hindu yang memiliki kemampuan ekonomi yang relatif cukup. Sumbangan tokoh politik yang dihaluskan dengan sebutan *dana punia* tersebut dianggap dapat mendukung upaya pemeliharaan, renovasi dan *piodalan* di pura sehingga umumnya umat Hindu tidak melihat dan merasakan fenomena itu sebagai pergeseran fungsi pura ke arah yang negatif dan tidak menimbulkan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, Wayan. 2012. “Kata Pengantar untuk Karya-karya Goris”, dalam Goris R. *Sifat Relegius Masyarakat Pedesaan di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Fox, David. 2002. *Pura Besakih: Temple, Religion and Society In Bali*. Leiden: KITLP Press.
- Goris, R. 1935. “Het godsdienstig karakter der Balische dorpsgemeenschap”. Dalam *Djava*, XV, 1 – 16.
- Goris, R. 1937. “Bali Tempelwezen”. Dalam *Djava* XVII: 18 – 23.
- Mardiarsito, 1978. *Kamus Jawa Kuno Indonesia*. Ende – Flores: Nusa Indah
- Mashad, Dhurorudin. 2014. *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Pitana, I Gde. 2001. “Sosiologi Pura: Isu di Antara Perseteruan Status dan Kewargaan”, dalam Urs Ramseyer dan I Gusti Panjti Tisna (eds) *Bali dalam Dua Dunia*, hlm.121-132. Denpasar: MatameraBook.
- Putra, I Gst Agung Gede. 1980. *Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Bali*. Denpasar: Pemda Bali.
- Putra, I Nyoman Darma. 2008. *Bali dalam Kuasa Politik*. Denpasar: Buku Arti.

Suprpto. 2013. *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid*. Jakarta: Kencana.

Warna, I Wayan. 1998. *Kamus Kawi-Bali*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.

Daftar Informan:

1. Prof. Dr. Nengah Duija, Msi (Rektor IHDN Denpasar)
2. Prof. Dr. Wayan Suarjaya, Msi (Mantan Dirjen Bimas Hindu dan Budha, Kementerian Agama RI dan Dosen IHDN).
3. Dr. Wayan Wastawan, MA (Dekan Fakultas Dharma Dutha IHDN).
4. Prof. Dr.I Gusti Ngurah Sudiana, Msi (Dosen Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar dan Pengurus Harian PHDI Bali).
5. Drs. I Ketut Wiana, M.Si (Praktisi Sekaligus Akademisi Agama Hindu).
6. Nyoman Rabeh (73 th) (Mantan Kelihan Banjar Bale Kembar Desa Pakraman Bualu).
7. Ketut Simpartha (52 th) (Kelihan Warga Tuban Kresna Kepakistan Desa Pakraman Bualu).